



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jl.Wolter Monginsidi No.1 Telp : (0541)-6724936 Fax : (0541)-6724936

Website : www.dprdkutaikartanegara.go.id E-mail : setwan@dprdkutaikartanegara.go.id Kode Pos : 75511

NOTULENSI RAPAT

Tanggal : 16 Januari 2025
Tempat : DPMPTSP DKI Jakarta
Perihal : Rapat Kerja Pansus Raperda Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko di DPMPTSP DKI Jakarta

RESUME KEGIATAN

Ketua Pansus DPRD Kab. Kutai Kartanegaraa (Eko Wulandanu)	: <ul style="list-style-type: none">- Sambutan Ketua Pansus- Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan potensi daerah yang sangat mempuni dalam bidang usaha.- Tim selama beberapa bulan ini telah turun ke lapangan untuk melihat dan mengumpulkan data terkait kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan perizinan.- Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Masyarakat dalam melakukan proses pendaftaran perizinan, diantaranya adalah jaringan internet yang tidak merata di seluruh wilayah kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini menjadi kendala utama karena proses perizinan berbasis online tentunya sangat bergantung pada jaringan internet.- Selain itu jarak antara tempat tinggal warga dengan kantor Desa atau Kecamatan yang jauh juga menjadi kendala dalam mendapatkan akses perizinan dan kurangnya pemahaman Masyarakat terkait perizinan sehingga adanya ketidaktahuan Masyarakat terkait mekanisme proses perizinan.
	- Pemutaran Video Profil DPMPTSP Jakarta

<p>DPMPTSP DKI Jakarta (Moh. Luthfi Anshori)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan OSS dari tahun 2021 padahaln OSS udah ada sejak tahun 2018, memiliki system Jakevo untuk mencover perizinan yang tidak tercover oleh OSS. - OSS ini menstandarisasi perizinan seluruh daerah, - Minimarket itu dulu tidak terbit secara otomatis karena ada kajian-kajian yg dilalui, kalo sekarang minimarket masuk resiko rendah, sehingga mudah untuk mendapatkan izin. - Meskipun dalam OSS terbit secara otomatis maka tetap perlu ada pengawasan dan audit terkait persyaratan, seperti jarak pembuatan minimarket diatur dalam peraturan daerah - Setelah UU Cipta Kerja perizinan itu ada 2 pintu, ke OPD dulu bar uke PTSP karena perubahan UU CK dan PP 5 tahun 2021 - Perda 12 tahun 2013 Pergub 47 tahun 2017, mengatur kegiatan PTSP hingga ke Kelurahan, tujuannya memberikan pelayanan lebih dekat kepada Masyarakat. - Menyediakan tempat konsultasi di 316 Servis Point dan membuka gerai di Pasar dengan tujuan untuk menyelesaikan NIB di seluruh pasar. - Pelaku usaha micro kita dorong untuk naik kelas dengan cara membuatkan mereka NPWP problemnya Masyarakat tidak mau membuat NPWP alasannya takut pajak. - Jakpraner, adalah para pelaku usaha micro yang memiliki potensi, kita bantu dalam seluruh proses perizinannya bahkan hingga sertifikasi halal dan jika diperlukan seperti HAKI nya kita bantu prosesnya. - Di KBLI ada jenis usaha yang dilakukan keliling dengan menempatkan ijin usaha nya di rumah, agar NIB tetap bisa terbit.
--	--

<p>Anggota Pansus DPRD Kab. Kutai Kartanegara (Rahmat Darmawan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kami berharap dalam perda Perizinan Berbasis Resiko ini ada muatan-muatan local yang ada di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, muatan local ini penting menurut kami karena secara kondisi budaya dan geografis ada hal yang berbeda dengan daerah lain. - Tekait pelayanan DPMPTSP DKI Jakarta yang memberikan pelayanan hingga level Kecamatan dan Kelurahan, kami perlu mendapat penjelasan terkait program DPMPTSP yang ada di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, apakah proses tersebut hanya pemeriksaan administrasi terkait porses perizinan atau hingga proses tersebut hingga penerbitan perizinan.
<p>DPMPTSP DKI Jakarta (Moh. Luthfi Anshori)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan DPMPTSP hingga ke level Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Pelimpahan Kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2017, perturan tersebut mengatur kewenangan perizinan hingga level Kelurahan namun tidak semua perizinan dapat di proses di level Kelruahan akan tetapi hanya yang masuk dalam kategori resiko rendah saja. - Kami juga menyediakan program AJIB, yang mana program ini memberikan layanan kepada Masyarakat dengan cara melakukan antar jemput proses perizinan, hal ini bertujuan untuk mengakomodir atau memberikan pelayanan kepada pihak Masyarakat yang tidak dapat secara langsung datang ke Kantor DPMPTSP DKI Jakarta.
<p>DPMPTSP Kab Kutai Kartanegara (Bahauddin)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kami ingin shareing terkait nomeklatur penamaan Rancangan Peraturan Daerah perizinan berbasis resiko atau cukup perizinan saja ? karena Perizinan berbasis resiko ini sudah detail dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021. - Proses penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dalam jangka waktu satu jam, berdasarkan pengalaman

	<p>dan pengetahuan kami Perumahan Rakyat Berpenghasilan Rendah saja yang dapat melakukan proses perizinan PBG secara cepat, namun ijin PBG selain itu apakah bisa, karena perlu ada konsultan dalam proses gambar dan lain sebagainya, kemudian beban biaya gambar bagaimana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di Kabupaten Kutai Kartanegara ada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait radius pendirian minimarket, dari Perda tersebut diatur jarak seribu meter untuk Pembangunan minimarket. - Terkait proses perizinan di bidang Kesehatan di limpahkan hingga level Kelurahan ini sangat menarik, kategori seperti apa yang dapat menjadi kewenangan Kelurahan untuk mengeluarkan ijin di bidang Kesehatan. - DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara ada system namanya si Cantik untuk mempermudah proses perizinan.
DPMPTSP Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Post Audit dengan pengawasan atau ada laporan dari Masyarakat secara isidentil - Titik koordinat yang ada dalam OSS harus sama dengan usaha yang ada dilapangan, kemudian dicek kelengkapan - KKPR akan diterbitkan jika ada IMB nya sudah ada padahal ada persyaratan lain yang dibutuhkan seperti PNBP dan lain sebagainya. - MBP Digital belum dilaksanakan yang dapat diterbitkan oleh wilayah Kabupaten. - Perda 12 tahun 2013 DKI Jakarat kemudian ada Pergub 47 tahun 2017 dengan adanya UUCK maka perlu ada nya penyesuaian. - Maka ada pergub baru mengatur terkait penanaman modal,PTSP, melakukan integrasi dengan OSS.

	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait dengan konsultan gambar bangunan kami menyediakan arsitek gratis dengan luasan bangunan maksimal 200 M² - Tugas AJIB tersebut salah satunya melakukan patroli untuk melakukan monitoring salah satunya bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin sehingga bisa melakukan Tindakan-tindakan penertiban hingga melakukan penutupan usaha.
--	--